

Analisis Kebijakan Jaminan Kesehatan Umum

Assurance Policy Analysis General Health

Aji Putra Samsal¹, Tri Inda Fadhila Rahma²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ajifunk24@gmail.com, triindafadhila@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan jaminan kesehatan umum di Indonesia adalah hal yang penting untuk menunjang kemajuan suatu negara. Penelitian ini bertujuan mengetahui pendapat orang lain dan dianalisis oleh peneliti sehingga dibuat sebuah argumentasi dari si peneliti. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan peneliti ialah Wawancara dan melihat sumber dari berbagai jurnal dan buku. Hasil yang didapat dalam penelitian adanya ketidaksetujuan masyarakat terhadap peningkatan uang iuran BPJS. Kesimpulan yang diambil dari jurnal ini pendapat responden sangat logis karena mereka juga memikirkan orang lain. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah yang menghapuskan golongan tersebut mendapatkan kontr dari berbagai masyarakat di Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan Jaminan Umum, kesehatan umum, BPJS kesehatan umum

ABSTRACT

Public health insurance policies in Indonesia are important to support the progress of a country. This study aims to find out the opinions of others and analyzed by the researcher so that an argument is made from the researcher. This research method uses descriptive qualitative. The technique used by the researcher is interviews and looking at sources from various journals and books. The results obtained in the study of public disapproval of the increase in BPJS contributions. The conclusion drawn from this journal is that respondents' opinions are very logical because they also think about other people. Therefore, the government's policy to abolish these groups has received controversy from various people in Indonesia.

Keyword : General Insurance Policy, public health, BPJS general health

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Di negara berkembang seperti Indonesia, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya. (Hubaib Alif :1)

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang

Kesehatan. (Joni Afriko: 21). Oleh karena itu kesehatan adalah suatu kondisi jiwa maupun tubuh dalam keadaan tidak bermasalah, kesehatan bisa dikatakan menjadi 3 bagian, yaitu kesehatan badan, jiwa dan sosial. Kesehatan badan adalah kondisi dimana fisik seseorang dalam keadaan produktif atau tidak dalam keadaan sakit. Kesehatan jiwa adalah kondisi mental tidak terganggu dari hal-hal apapun. Kesehatan sosial adalah kondisi yang memiliki hubungan baik kepada masyarakat sekitar serta rekam-rekan.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan, dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun proses implementasi tidak bekerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya. Dalam kaitan ini, seperti dikemukakan oleh Budiman (2013),

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diberlakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat di negara Indonesia. Implementasi Program jaminan kesehatan dimulai pada 1 Januari 2014 (UU SJSN, 2012)

Implementasi Jaminan kesehatan umum atau nasional dilakukan oleh BPJS sehingga program tersebut diwajibkan oleh pemerintah Indonesia agar seluruh rakyat Indonesia ikut serta dalam program tersebut. Pemerintah juga menetapkan keputusan untuk membagi kartu KIS secara gratis untuk rakyat kurang mampu dari segi finansial.

Beberapa instansi yang menyediakan jaminan kesehatan umum kepada seluruh rakyat Indonesia diantaranya nya BPJS dan asuransi jiwa. Asuransi jiwa sangat banyak di Indonesia, salah satu contohnya adalah prudensial dll.

Baru-baru ini kebijakan oleh pemerintah dalam kesehatan berubah. Dalam BPJS tidak ada lagi yang termasuk golongan 1,2 dan 3. Sehingga golongan tersebut menjadi satu agar tidak terjadi suatu kekeliruan di masa yang akan nanti.

Kebijakan asuransi jiwa tergantung instansi nya karena biasanya kebijakan asuransi jiwa banyak melakukan perubahan karena ingin menarik orang yang ingin melakukan asuransi jiwa.

METODE

Metode penelitian ini dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif. deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti objek, suatu kondisi, sekelompok manusia, atau fenomena lainnya dengan kondisi alamiah atau riil (tanpa situasi eksperimen) untuk membuat gambaran umum yang sistematis atau deskripsi rinci yang faktual dan akurat.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan melihat beberapa penelitian yang akan dianalisis oleh peneliti. Narasumber yang diambil hanya 2 orang pengguna Jaminan kesehatan. Lokasi penelitian di kota medan jalan bhayangkara.

Peneliti ingin menganalisis beberapa kebijakan pemerintah dalam perubahan yang telah dibuat oleh kementerian kesehatan dengan mewawancara narasumber.

Penelitian ini berfokus menganalisis kebijakan jaminan kesehatan umum yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan di Indonesia.

HASIL

Kebijakan pemerintah tentang jaminan kesehatan dari instansi BPJS mengeluarkan bahwasanya untuk golongan golongan dihapuskan sehingga seluruh BPJS sehingga penerapan kelas BPJS sama tidak ada membedakan tingkatan (CBNC Indonesia).

BPJS adalah program pemerintah dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang diwajibkan di Indonesia bagi seluruh rakyat, pemerintah dari tahun 2018 sudah mengeluarkan kebijakan mengeluarkan kartu KIS sehingga kesehatan masyarakat dijamin oleh negara.

Kebijakan yang diambil pemerintah baru-baru ini menimbulkan beberapa kontra dari kalangan masyarakat sehingga menimbulkan keributan. Serta adanya kenaikan biaya iuran BPJS.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan masalah yang ada tentang kebijakan yang dibuat oleh kementerian kesehatan di Indonesia. Adapun hal yang ingin diajukan pertanyaan kepada narasumber ialah

1. Berapa iuran BPJS sekarang!
2. Apakah sudah sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat?
3. Apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah jika diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat tentang jaminan kesehatan umum di Indonesia.

Dari pernyataan responden pertama bahwasanya iuran BPJS sebesar Rp. 42.000,- Responden mengatakan bahwa keadaan ekonominya mencukupi untuk membayar iuran tersebut. Saran dari responden ini pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan kebijakan yang membuat masyarakat menjadi khawatir dengan keadaan ekonomi, seperti yang didengar di stasiun tv dua bulan yang lalu.

Dari pernyataan di atas responden termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena untuk pembayaran iuran BPJS narasumber termasuk bagian PBI. Karena responden memiliki kedai sayuran sehingga untuk hal seperti itu bisa dibayarkan tiap bulannya. Sarannya itu terjadi di 2018 yang hutang Indonesia yang semakin meningkat. Sehingga jalan yang diambil pemerintah seperti itu mempersulit ekonomi bangsanya sendiri.

Pernyataan dari responden kedua iuran yang dikeluarkan tiap bulan sebesar Rp. 150.000,-. Menurut responden iuran untuknya sesuai tetapi untuk orang lain belum tentu sesuai. Kebijakan pemerintah yang menghilangkan golongan atau kelas di BPJS seharusnya bayarnya sama bukan semakin meningkat.

Dari pernyataan di atas responden adalah golongan kelas III. Pendapat ibu tersebut sangat logis karena tidak semua orang memiliki rezeki yang sama dan kondisi yang sama. Sarannya bagus karena peningkatan jaminan kesehatan mungkin akan menambah peluang kematian bertambah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat menganalisis kekurangan kebijakan pemerintah dalam mengatur urusan jaminan kesehatan umum untuk masyarakat. Peneliti juga menyimpulkan dari dua responden tersebut bahwasanya hal yang tidak disetujui adalah peningkatan uang iuran di kalangan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Afriko, Joni. *Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya Dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan*. Bogor: IN MEDIA, 2016.
3. Budiman, 2013. *Kebijakan Publik Dan Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung : Hakim Publishing
4. Khariza, Hubaib Alif. "Program Jaminan Kesehatan Nasional : Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional." *Kebijakan dan Manajemen Publik 3* (2015): 1
5. Thalib jamaluddin. 2013. Studi Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat di rumah sakit umum daerah kabupaten buton.
6. Universitas Hasanuddin. Diakses Juni 2015.